



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAKIN ITJEN 2017

**LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2017**



Jl. Harsono RM No. 3, Gedung B, Lantai 2
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

**Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian**



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 4 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon / Fax. 021 - 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

Nomor : B-1584/RC-330/G/02/2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017

23 Februari 2018

Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 (terlampir).

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Inspektur Jenderal
Justan R Siahaan

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

7

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	2
C. ORGANISASI DAN FUNGSI – FUNGSI	4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI	6
B. MISI	7
C. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	9
D. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN	9
E. PERJANJIAN KINERJA	11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN HASIL PROGRAM (OUTCOME)	12
B. AKUNTABILITAS DANA	42

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA	49
B. RENCANA TINDAK STRATEGIS	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjelasan Umum Organisasi

Kebijakan dan paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal telah mengalami perubahan, semula yang bersifat *watchdog* menjadi bersifat konsultansi. Paradigma pengawasan ke depan diharapkan bersifat katalis sebagai bentuk dari pencapaian tahap *Quality Assurance*, dimana peran pengawasan intern lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan hal tersebut, maka strategi pengawasan yang akan ditempuh adalah pengawasan yang lebih bersifat pre-emptif dan preventif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Upaya penanganannya pun akan lebih tepat yang akan berdampak pada tercapainya tingkat keefektifan dan efisien program/kegiatan yang dilaksanakan.

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden No.45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Isu Strategis

Sektor Pertanian menurut data diketahui menyumbang kontribusi sebesar 10,70% terhadap GDP Nasional dan penyumbang devisa negara 8,24 miliar US\$ (triwulan 2 tahun 2017), menyerap 31,86% angkatan kerja (Sakernas, Feb 2017), dan menjadi penyedia pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian menjadi sektor yang penting dan harus

mendapatkan perhatian khususnya dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan di Indonesia.

Indikator tercapainya Visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045 adalah meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Indonesia menjadi level 3 pada tahun 2045. Sesuai data Economist Intelligence Unit pada *Global Food Security Index (GFSI)* Tahun 2017 Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia berada pada tingkat 69 dari 113 Negara.

Sebagai upaya mengawal perwujudan visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia, Inspektorat Jenderal melakukan pengendalian intern atas program dan layanan Kementerian Pertanian melalui kegiatan audit dan pembinaan SPIP sehingga terwujud akuntabilitas pelaksanaan program dan layanan lingkup Kementerian Pertanian.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, disamping ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal yang independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian

Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kepada Menteri

Pertanian. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Pertanian atas kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2017. Disamping itu, laporan ini juga merupakan sarana (*tools*) perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

C. ORGANISASI DAN FUNGSI - FUNGSI

Sesuai Permentan No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Itjen Kementan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dibentuk unit Eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif yang terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

3. Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4. Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

6. Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu serta upaya pencegahan korupsi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparatur Pengawasan Intern Kementerian Pertanian telah melakukan perubahan paradigma dari *watch dog* menuju paradigma baru sebagai *consulting partner* yaitu menjadi lembaga yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Peran dan posisi Inspektorat Jenderal saat ini sejalan dengan peran dan posisi dalam visinya yaitu :

“Menjadi Pengawas Intern Mitra Pro-aktif Pengelola Program Pertanian dalam rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

Kata kunci terpenting dalam peran Inspektorat Jenderal tersebut adalah kesadaran untuk menyatakan diri sebagai pengawas internal pemerintah secara aktif menjadi mitra untuk lebih mempercepat/mengawal perwujudan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani merupakan inti dari seluruh upaya pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai arah dan tujuan sekaligus mendasari upaya-upaya peningkatan kualitas pengawasan. Dengan jati diri yang tetap bertumpu pada visi tersebut, Inspektorat Jenderal menjadikan visi tersebut senantiasa menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Dalam visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut:

Uraian	Definisi
Pengawas Intern	Aparat pengawas intern adalah aparat yang bertugas secara independen untuk memberikan jaminan keyakinan yang memadai serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi melalui kegiatan dengan cara memberikan suatu pendekatan

	disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian proses dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi;
Mitra	Pertemanan atau persahabatan auditor dengan auditi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam konotasi positif guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
Pro-aktif	Lebih aktif, menjemput bola bukan tunggu bola. Artinya Aparatur Inspektorat Jenderal dituntut memiliki sikap proaktif selalu memiliki visi ke depan, memandang masa depan dengan penuh optimisme, selalu aktif dan memikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sikap proaktif cenderung mengarah pada tindakan (<i>action</i>) yang positif;
Pengelola Program Pertanian	Seluruh pejabat dan penanggung jawab kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;
Kedaulatan Pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
Kesejahteraan Petani	Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya.

B. MISI

Terwujudnya visi yang dinyatakan diatas, merupakan perwujudan dukungan Inspektorat Jenderal atas visi Kementerian Pertanian secara keseluruhan. Untuk mewujudkan visi diatas, Inspektorat Jenderal menetapkan misi dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat keberadaan Inspektorat Jenderal bagi mitra kerja dan kinerja aspek pendukung lainnya. Misi yang ditetapkan dalam mencapai Visi Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1

Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan. Kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian yang difokuskan pada program strategis swasembada padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah, dan cabai. Jenis-jenis kegiatan pengawasan intern terdiri dari, audit kinerja, pengawalan (konsultasi dan asistensi), pengawasan dengan tujuan tertentu (audit investigasi dan non investigasi), revidu, evaluasi kinerja berbasis hasil dan kegiatan pengawasan lainnya. Jenis-jenis dan tujuan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diarahkan pada peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian dalam rangka mendukung pencapaian kedaulatan pangan.

2. Misi 2

Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif. Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian melalui beberapa kegiatan, seperti assessment terhadap kondisi SPIP pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, pembinaan dan apresiasi.

3. Misi 3

Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, mengamanatkan perwujudan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif yaitu: (1) memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (2) memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas penanganan manajemen risiko (*enterprise risk management*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Efektivitas peran tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di level 3.

C. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2015 – 2019 menetapkan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan sasaran strategis program berupa meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pencapaian Visi dan Misi akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi dan misi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Adanya penugasan yang jelas dari pimpinan
2. Adanya kepercayaan *stakeholder*/mitra terhadap fungsi Inspektorat Jenderal
3. Tumbuhnya kesadaran bersama untuk melaksanakan pengawasan secara kompeten dan berintegritas
4. Sifat manajemen yang tanggap (*quick response*) dan adaptif (*open management*)
5. Adanya pola rotasi internal
6. Adanya dana, sarana, dan prasarana serta jaringan yang memadai
7. SDM yang kapabel dan terus meningkatkan kapabilitasnya
8. Adanya komitmen bersama yang kuat untuk mencapai kinerja.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication Technology* (ICT).

D. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal melaksanakan **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian**. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, maka Itjen Kementan menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan fokus pada program peningkatan kedaulatan pangan.
2. Pematangan (*maturitas*) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.

3. Audit, pengawalan (asistensi dan konsultansi), reviu dan evaluasi berbasis capaian kinerja (*Results-Based Monitoring and Evaluation System*).

Kebijakan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada 8 (delapan) kegiatan strategis, dalam rangka mendukung swasembada pangan (padi, jagung, kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai dan kakao) melalui peningkatan pengawasan pada satuan kerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan lingkup Eselon II Itjen Kementan

Inspektorat I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP. 2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.
Inspektorat II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP. 2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.
Inspektorat III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.
Inspektorat IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.
Inspektorat Investigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Dengan Tujuan Tertentu. 2. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Investigasi.
Sekretariat	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

E. PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengikat komitmen pencapaiannya, target kinerja tahun 2017 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017. PK yang telah disetujui oleh Inspektur Jenderal ini merupakan *Performance Agreement* antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, dalam proses manajemen kinerja sehingga dapat menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Indikator Kinerja			
No	Uraian	Satuan	Target
Sasaran Strategis : Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian			
1	Rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan oleh:		
	a. Penanggungjawab Program (Eselon I)	%	75
	b. Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/ Satker)	%	80
2	Rekomendasi hasil audit Investigasi yang dimanfaatkan oleh:		
	a. Penanggungjawab Program (Eselon I)	%	80
	b. Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/ Satker)	%	80
3	Rekomendasi hasil pendampingan/pengawasan yang dimanfaatkan oleh Penanggung jawab program tingkat Eselon I	%	80
4	Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program tingkat Eselon I	%	70
5	Rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program tingkat Eselon I	%	76
Sasaran Strategis : Meningkatkan maturasi penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian			
1	Unit kerja <i>level performing</i>	%	60
2	Nilai unit kerja Zona Integritas WBK / WBBM	Nilai	87
Sasaran Strategis : Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementan			
1	Nilai Internal Audit Capability Model/IACM	Level	3

Sumber : Penetapan Kinerja Itjen 2017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN HASIL PROGRAM (OUTCOME)

Capaian hasil program menggambarkan *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Capaian hasil Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian secara ringkas tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Program (Outcome)

No	Indikator Kinerja				
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis : Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian					
1	Rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan oleh :				
	c. Penanggungjawab Program (Eselon I)	%	75	87,72	116,96
	d. Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/ Satker)	%	80	87,54	109,43
2	Rekomendasi hasil audit Investigasi yang dimanfaatkan oleh :				
	c. Penanggungjawab Program (Eselon I)	%	80	66,67	83,33
	d. Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/ Satker)	%	80	100,00	125,00
3	Rekomendasi hasil pendampingan/pengawasan yang dimanfaatkan oleh Penanggung jawab program tingkat Eselon I	%	80	87,79	109,74
4	Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program tingkat Eselon I	%	70	85,19	121,69
5	Rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program tingkat Eselon I	%	76	94,64	124,53
Sasaran Strategis : Meningkatkan maturasi penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian					
1	Unit kerja level performing	%	60	55,88	93,13
2	Nilai Unit kerja Zona Integritas WBK/WBBM	%	87	90,62	104,16
Sasaran Strategis : Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementan					
1	Nilai Internal Audit Capability Model/IACM	Level	3	3	100,00

Catatan:

- berkategori sangat berhasil (capaian >100%)
- berkategori berhasil (capaian 80 – 100%)
- berkategori cukup berhasil (capaian 60 – 79%)
- berkategori kurang berhasil (capaian <60%)

Sumber : Penetapan Kinerja Itjen 2017

Sebagaimana disajikan dalam tabel 3 capaian hasil program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian

a. Rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab Program (Eselon I) dan penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/Satker) dengan target masing-masing sebesar 75% rekomendasi hasil audit kinerja dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (Eselon I) dan 80% dimanfaatkan oleh penanggungjawab kegiatan (Eselon II/satker)

Rekomendasi hasil Audit Kinerja yang dimanfaatkan diukur melalui pendekatan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan, sehingga nilai realisasi tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan audit kinerja menjadi rekomendasi yang dimanfaatkan baik oleh penanggung jawab program (Eselon I) maupun penanggung jawab kegiatan (Eselon II/Satker).

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015 s.d. 2017

IK-1	Rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan									
	Penanggungjawab Program (Es 1)					Penanggung jawab Kegiatan (Es II/Satker)				
Tahun	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)	7	8	9	10 (9/8)	11 (10/7)
2015	70	140	80	57,14	81,63	75	1231	750	60,93	81,23
2016	72	77	55	71,43	99,21	77	600	459	76,50	99,35
2017	75	114	100	87,72	116,96	80	602	527	87,54	109,43
2018	81					81				
2019	85					85				

TPK : Target sesuai PK C : % Capaian Tindak Lanjut

R : Realisasi Rekomendasi K : % Kinerja Sesuai PK

TL : Tindak Lanjut Rekomendasi

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Inspektorat Jenderal selama tahun 2017 telah melaksanakan Audit Kinerja terhadap satker-satker lingkup Kementan sebanyak 602 penugasan pengawasan (PP) dengan jumlah satker teraudit sebanyak 602 satker atau 89,85% dari total satker lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 670 satker.

Dari hasil audit kinerja tersebut telah diterbitkan 602 Laporan Hasil Audit

(LHA) atau 100% dari target LHA yang diterbitkan pada penugasan pengawasan tahun 2017 sebanyak 602 PP.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Apabila dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan Audit Kinerja tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah penugasan pengawasan sebesar 41,05% dimana pada tahun 2016 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Audit Kinerja sebanyak 475 penugasan dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 602 penugasan pengawasan.

Berdasarkan hasil pemantauan pada Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan, pada tahun 2017 diperoleh data jumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam 602 LHA yang diterbitkan sebanyak 716 rekomendasi dengan rincian 114 rekomendasi kepada penanggung jawab program (Eselon I) dan 602 rekomendasi kepada penanggung jawab kegiatan (Eselon II/satker).

Sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dari 716 rekomendasi kepada penanggung jawab program (Eselon I) telah ditindaklanjuti sebanyak 100 rekomendasi atau 87,72% dan rekomendasi kepada penanggung jawab kegiatan dari 602 rekomendasi telah ditindaklanjuti sebesar 527 rekomendasi atau 87,54%

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017, ditetapkan bahwa target capaian indikator kinerja rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab Program (Eselon I) dan penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/ Satker) dengan target masing-masing sebesar 75% rekomendasi hasil audit kinerja dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (Eselon I) dan 80% dimanfaatkan oleh penanggungjawab kegiatan (Eselon II/satker). Capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator kinerja tersebut masing-masing adalah 116,96% rekomendasi dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (Eselon I) dan 109,43% rekomendasi yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab kegiatan (Eselon II/satker).

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Apabila dibandingkan dengan realisasi jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada Audit Kinerja tahun 2016, terdapat peningkatan jumlah rekomendasi yang dihasilkan sebesar 5,76% dari 677 rekomendasi pada tahun 2016 menjadi 716 rekomendasi pada tahun 2017. Apabila dibandingkan pada aspek jumlah persentase tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan maka terdapat juga terjadi peningkatan persentase tindak lanjut hasil rekomendasi sebesar 13,61% dari persentase tindak lanjut hasil rekomendasi Audit Kinerja tahun 2016 sebesar 73,96% menjadi 87,57% pada tahun 2017.

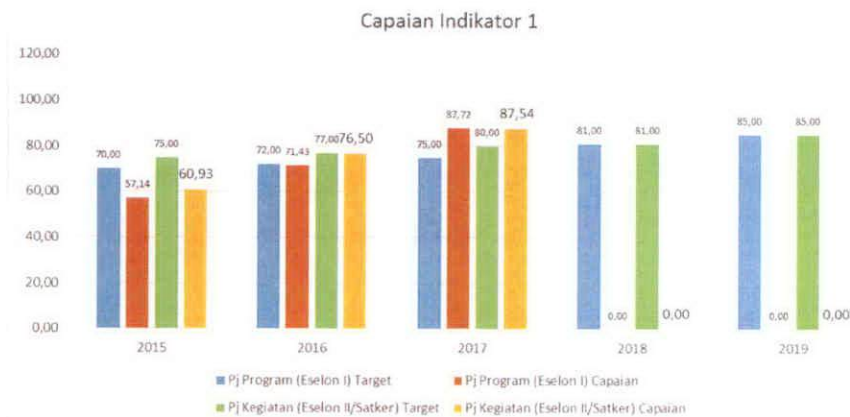
Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Dilihat dari capaian atas indikator kinerja 1 tahun 2015 s.d. 2017, terdapat peningkatan capaian yang signifikan terhadap rekomendasi kepada penanggung jawab program / eselon I dengan nilai capaian dari tahun 2015 sebesar 57,14% menjadi 71,43% tahun 2016 dan menjadi 87,72% pada tahun 2017.

Pada capaian terhadap rekomendasi kepada penanggung jawab kegiatan (eselon II/satker) terdapat peningkatan capaian yang signifikan dengan nilai capaian dari tahun 2015 sebesar 60,93% menjadi 76,50% tahun 2016 dan menjadi 87,54% pada tahun 2017.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan tahun 2015 s.d. 2017, apabila dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015 – 2019, diketahui bahwa tahun 2017 telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam renstra. Capaian tersebut dideskripsikan pada grafik sebagai berikut:



Grafik 1. Capaian Indikator 1 tahun 2015 s.d. 2017

Dilihat pada grafik tersebut diketahui bahwa nilai capaian indikator 1 apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan diperoleh hasil yang memuaskan dengan capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan. Faktor pendukung keberhasilan capaian tersebut adalah telah diterapkannya perencanaan pengawasan berbasis risiko dalam menentukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan mempertimbangkan faktor nilai risiko tinggi yang dijadikan sebagai prioritas dalam sasaran pengawasan. Disamping itu adanya penghematan dalam penggunaan anggaran, memungkinkan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kinerja. Pengelolaan SDM aparatur pengawas telah dilakukan secara proporsional berdasarkan peran dan tanggung jawab Auditor secara berjenjang. Sistem manajemen audit telah diterapkan sejak tahap perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan evaluasi audit.

Tabel 5. Capaian Indikator 1 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian Terhadap Renstra (%)	
	Pj Program (Eselon I)	Pj Kegiatan (Eselon II/Satker)	Pj Program (Eselon I)	Pj Kegiatan (Eselon II/Satker)	Pj Program (Eselon I)	Pj Kegiatan (Eselon II/Satker)
1	2	3	4	5	6 (4/2)	7 (5/3)
2015	70,00	75,00	57,14	60,93	67,23	71,68
2016	72,00	77,00	71,43	76,50	84,03	90,00
2017	75,00	80,00	87,72	87,54	103,20	102,99
2018	81,00	81,00				
2019	85,00	85,00				

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil Audit Kinerja yang dimanfaatkan tahun 2017 untuk penanggung jawab program (Eselon I) telah mencapai 103,20% termanfaatkan dan penanggung jawab kegiatan (Eselon II/Satker) telah mencapai 102,99% dari target yang ditetapkan sebesar 85% pada tahun 2019. Ini menunjukkan kinerja pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat melalui peran *consulting partner* dan pengawasan serta pemantauan telah berjalan dengan baik.

Temuan Kerugian Negara

Tabel 6. Nilai Kerugian Negara dan Tingkat Inefisiensi Tahun 2015 s.d. 2017

Tahun	Anggaran Teraudit	Nilai Temuan	Inefisiensi
1	2	3	4 (3/2)
2015	18.608.208.015.000	65.428.649.114	0,35
2016	10.481.723.554.605	24.325.195.619	0,23
2017	18.958.983.055.238	6.538.768.944	0,03

Sumber data : Bagian DPLHP

Sebagai gambaran jumlah nilai temuan Audit Kinerja tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.538.768.944,08. Sedangkan anggaran yang diaudit tahun 2017 sebesar Rp18.958.983.055.238 atau 78,48% dari anggaran Kementerian Pertanian tahun 2017 sebesar Rp24.157.744.764.600. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2016 lebih efisien dan tingkat *inefisiensi* pelaksanaan program/kegiatan sebesar 0,03%. Dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah nilai temuan sebesar Rp24.325.195.618,95 dengan jumlah anggaran yang diaudit sebesar Rp10.481.723.554.605,00 sehingga dapat ditekan potensi terjadinya inefisiensi sebesar 0,23%. Sedangkan tahun 2015, jumlah nilai temuan sebesar Rp65.428.649.114 dengan jumlah anggaran yang diaudit sebesar Rp18.608.208.015.000 sehingga dapat ditekan potensi terjadinya inefisiensi sebesar 0,35%. Dengan demikian, atas rekomendasi audit kinerja yang dimanfaatkan telah mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan program/anggaran Kementerian Pertanian hal terlihat adanya penurunan nilai inefisiensi dari tahun 2015 sebesar 0,35 menjadi 0,23 pada tahun 2016 dan menurun menjadi 0,03 pada tahun 2017. Terhadap risiko terjadinya

inefisiensi akan dilakukan pemantauan berkelanjutan atas tindak lanjut temuan tersebut.

b. Rekomendasi hasil audit investigasi yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab Program (Eselon I) dan penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/Satker) dengan target masing-masing sebesar 80% rekomendasi hasil audit investigasi dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (Eselon I) dan 80% dimanfaatkan oleh penanggungjawab kegiatan (Eselon II/satker)

Inspektorat Investigasi selama tahun 2017 melaksanakan 90 penugasan Audit Tujuan Tertentu dan 2 penugasan Audit Investigasi. Dari hasil audit investigasi tersebut telah diterbitkan 2 Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Tahun 2015 s.d. 2017

IK-2	Rekomendasi hasil audit investigasi yang dimanfaatkan									
	Penanggungjawab Program (Es I)					Penanggungjawab Kegiatan (Es II/Satker)				
Tahun	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)	7	8	9	10 (9/8)	11 (10/7)
2015	75	32	20	62,50	83,33	75	359	221	61,56	82,08
2016	76	53	33	62,26	81,93	76	131	83	63,36	83,37
2017	80	3	2	66,67	83,33	80	2	2	100,00	125,00
2018	85					85				
2019	90					90				

TPK : Target sesuai PK

C : % Capaian Tindak Lanjut

R : Realisasi Rekom

K : % Kinerja Sesuai PK

TL : Tindak Lanjut Rekomendasi

Sumber : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil pemantauan pada Bagian Data dan Pemantuan Laporan Hasil Pengawasan, diperoleh data jumlah rekomendasi Audit Investigasi yang dihasilkan sebanyak 5 rekomendasi dengan rincian 3 rekomendasi kepada penanggungjawab program (Eselon I) dan 2 Rekomendasi kepada penanggungjawab kegiatan (Eselon II/satker). Sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dari jumlah 5 rekomendasi kepada penanggung jawab

program (Eselon I) terdapat 2 rekomendasi atau 66,67% telah ditindaklanjuti yang dilakukan oleh unit Eselon I, sedangkan untuk rekomendasi kepada penanggung jawab kegiatan (Eselon II/sakter) sebanyak 2 rekomendasi telah ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi atau 100%.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017, ditetapkan bahwa target capaian indikator kinerja rekomendasi hasil audit investigasi yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab Program (Eselon I) dan penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/ Sakter) dengan target masing-masing sebesar 80% rekomendasi hasil audit investigasi dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (Eselon I) dan 80% dimanfaatkan oleh penanggungjawab kegiatan (Eselon II/sakter). Capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator kinerja tersebut masing-masing adalah adalah 83,33% rekomendasi dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (Eselon I) dan 125% rekomendasi yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab kegiatan (Eselon II/sakter).

Terdapat penurunan yang signifikan terhadap jumlah realisasi rekomendasi pada tahun 2017 disebabkan adanya kebijakan pimpinan bahwa kegiatan Audit Investigasi dilaksanakan terhadap pengaduan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi (tipikor), sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi unsur tipikor ditindaklanjuti melalui kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu. Hal ini menyebabkan jumlah penugasan atas Audit Investigasi mengalami penurunan yang signifikan.

Temuan Kerugian Negara Audit Investigasi

Nilai temuan kerugian negara atas Audit Investigasi tahun 2017 senilai Rp113.841.850,00 dan telah ditindaklanjuti senilai Rp113.841.850,00 (100%).

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, hasil audit investigasi telah diterbitkan 57 Laporan Hasil Audit (LHA). Berdasarkan hasil pemantauan pada Bagian Data Pemantuan Laporan Hasil Pengawasan, diperoleh data jumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam 57 LHA yang

diterbitkan sebanyak 184 rekomendasi dengan rincian 53 rekomendasi kepada penanggung jawab program (Eselon I) dan 131 Rekomendasi kepada penanggung jawab kegiatan (Eselon II/satker). Sampai dengan periode 31 Desember 2016 dari jumlah 53 rekomendasi kepada penanggung jawab program (Eselon I) sebanyak 33 rekomendasi atau 62,26% telah ditindaklanjuti yang dilakukan oleh unit Eselon I, sedangkan untuk rekomendasi kepada penanggung jawab kegiatan (Eselon II/satker) sebanyak 131 rekomendasi telah ditindaklanjuti sebanyak 83 rekomendasi atau 63,36%.

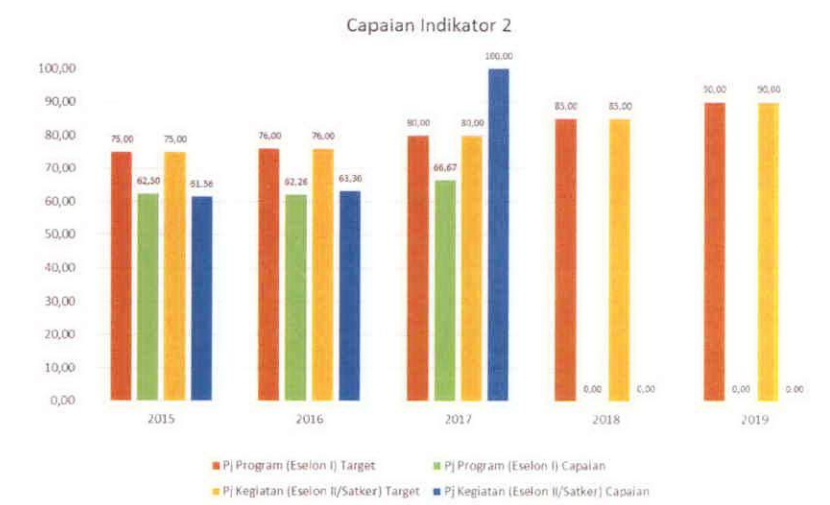
Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Dilihat dari capaian indikator kinerja 2 tahun 2015 s.d. 2017, terdapat fluktuasi nilai capaian indikator rekomendasi hasil audit investigasi yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program (eselon I) tahun 2015 sebesar 62,50% turun menjadi 62,26% tahun 2016 dan naik kembali menjadi 66,67% pada tahun 2017. Sedangkan terdapat peningkatan pada capaian indikator rekomendasi hasil audit investigasi yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan (eselon II/satker) tahun 2015 sebesar 61,56% menjadi 63,36% tahun 2016 dan naik menjadi 100% pada tahun 2017.

Adanya kecenderungan fluktuasi capaian pada level penanggung jawab program (eselon I) disebabkan oleh proses audit tindak lanjut atas pengaduan membutuhkan waktu yang relatif lama mengingat materi pengaduan cukup berat seperti pengaduan mengenai pupuk formula khusus. Adanya perubahan kebijakan pimpinan mengenai proses tindak lanjut pengaduan dimana sebelum audit investigasi dilakukan maka dilakukan audit tujuan tertentu terlebih dahulu. Sedangkan pada level penanggung jawab kegiatan (Eselon II/Satker) terdapat tren peningkatan disebabkan banyak materi aduan mengenai proses lelang sehingga rekomendasi atas audit investasi mengenai pelelangan segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat proses lelang yang dilakukan. Adanya peningkatan capaian tersebut didukung pula dengan sistem pengaduan yang dipantau melalui sistem informasi yang akurat untuk ditetapkan tindak lanjut audit terhadap pengaduan tersebut.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator rekomendasi hasil audit investigasi yang dimanfaatkan tahun 2015 s.d. 2017, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015-2019, diketahui bahwa tahun 2017 telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam renstra. Capaian tersebut dideskripsikan pada grafik sebagai berikut:



Grafik 2. Capaian Indikator 2 tahun 2015 s.d. 2017

Dilihat pada grafik tersebut diketahui bahwa nilai capaian indikator 2 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra, diketahui bahwa pencapaian tahun 2017 masih berada dibawah rata-rata target jangka menengah khususnya untuk tindak lanjut Audit Investigasi terhadap penanggung jawab program (eselon I).

Tabel 8. Capaian Indikator 1 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian Terhadap Renstra (%)	
	Pj Program (Eselon I)	Pj Kegiatan (Eselon II/Satker)	Pj Program (Eselon I)	Pj Kegiatan (Eselon II/Satker)	Pj Program (Eselon I)	Pj Kegiatan (Eselon II/Satker)
1	2	3	4	5	6 (4/2)	7 (5/3)
2015	75,00	75,00	62,50	61,56	69,44	68,40
2016	76,00	76,00	62,26	63,36	69,18	70,40
2017	80,00	80,00	66,67	100,00	74,07	111,11
2018	85,00	85,00				
2019	90,00	90,00				

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil Audit Investigasi yang dimanfaatkan tahun 2017 untuk penanggung jawab program (Eselon I) telah mencapai 74,07% dan penanggung jawab kegiatan (Eselon II/Satker) telah mencapai 111,11% dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2019.

c. Rekomendasi hasil pengawalan yang dimanfaatkan oleh Penanggung jawab program tingkat Eselon I dengan target sebesar 80% rekomendasi hasil pendampingan/pengawalan dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (Eselon I)

Selama tahun 2017 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawalan meliputi pengawalan SPIP pengadaan barang dan jasa, Program Swasembada Pangan/Kegiatan Peningkatan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai, Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao, Kegiatan Peningkatan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia, Kegiatan Taman Teknologi Pertanian/Taman Sains Pertanian, dan Pengadaan Indukan Sapi Brahman Cross untuk mendukung swasembada daging.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Rekomendasi Pengawalan Tahun 2015 s.d. 2017

IK-3	Rekomendasi hasil pengawalan yang dimanfaatkan oleh Penanggungjawab Program (Eselon I)					
	Tahun	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)	
2015	70	375	211	56,27	80,38	
2016	75	186	130	69,89	93,19	
2017	80	213	187	87,79	109,74	
2018	85					
2019	95					

TPK : Target sesuai PK

R : Realisasi Rekomendasi

TL : Tindak Lanjut Rekomendasi

C : % Capaian Tindak Lanjut

K : % Kinerja Sesuai PK

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi pelaksanaan pengawalan tahun 2017, telah dilakukan 78 penugasan kegiatan pengawalan. Dari kegiatan pengawalan tersebut dihasilkan 78 Laporan Hasil Pengawalan yang menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh penanggung jawab program (Eselon I) sebanyak 213 rekomendasi. Sampai dengan posisi 31 Desember 2017, terhadap 213 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh penanggung jawab program (Eselon I) sebanyak 187 rekomendasi atau 87,79% .

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017, ditetapkan bahwa target capaian indikator kinerja rekomendasi hasil pengawalan yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab Program (Eselon I) sebesar 80% sedangkan capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator kinerja tersebut sebesar 109,74%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2016, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap kegiatan Upaya Khusus (Upsus) pencapaian produksi padi, jagung, dan kedelai. Dari hasil pengawalan yang dilaksanakan, telah diterbitkan 272 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 186 rekomendasi ditujukan kepada penanggung jawab program (Eselon I) dan telah dimanfaatkan sebesar 130 rekomendasi atau 69,89% sehingga capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator kinerja tersebut adalah 93,19%.

Terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 16,55% terhadap capaian persentase rekomendasi yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program (Eselon I) dari nilai capaian 93,19% menjadi 109,74%.

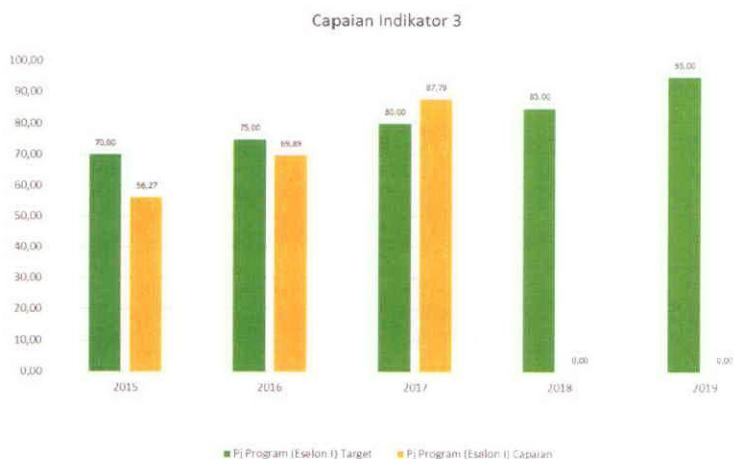
Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Dilihat dari capaian atas indikator kinerja 3 tahun 2015 s.d. 2017, terdapat peningkatan capaian yang signifikan dengan nilai capaian dari tahun 2015 sebesar 56,27% menjadi 69,89% tahun 2016 dan meningkat menjadi 87,79% pada tahun 2017. Keberhasilan ini didukung oleh peran Itjen sebagai *consulting partner* melalui pendampingan penyusunan dokumen register

risiko masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian sehingga seluruh unit mampu membuat instrumen-instrumen kendali teknis dan kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya risiko kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator rekomendasi hasil pengawalan yang dimanfaatkan tahun 2015 s.d. 2017, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015 – 2019, diketahui bahwa tahun 2017 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam renstra. Capaian tersebut dideskripsikan pada grafik sebagai berikut:



Grafik 3. Capaian Indikator 3 tahun 2015 s.d. 2017

Dilihat dari grafik diatas dapat diketahui terdapat tren peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan pengawalan. Inspektorat Jenderal dalam mengawal kegiatan strategis lingkup Kementerian Pertanian, fokus pada Sistem Pengendalian Intern untuk melakukan pengendalian atas risiko-risiko yang menyebabkan terjadinya kegagalan kegiatan yang dikawal. Setiap rekomendasi atas risiko penyebab kegagalan langsung ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan sebagai respon antisipasi risiko kegagalan yang terjadi sehingga rekomendasi tersebut dimanfaatkan secara efektif.

Tabel 10. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (3/2)
2015	70,00	56,27	59,23
2016	75,00	69,89	73,57
2017	80,00	87,79	92,41
2018	85,00		
2019	95,00		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawalan yang dimanfaatkan tahun 2017 untuk penanggung jawab program (Eselon I) telah mencapai 92,41% dari target yang ditetapkan sebesar 95% pada tahun 2019. Faktor pendukung keberhasilan capaian tersebut adalah kesigapan Auditor dalam memberikan layanan konsultasi (*consulting partner*) terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

d. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program tingkat Eselon I dengan target 70% rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (Eselon I)

Inspektorat Jenderal selama tahun 2017 melaksanakan kegiatan Evaluasi SAKIP lingkup Kementerian Pertanian. Dari hasil evaluasi SAKIP lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal diperoleh data jumlah rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 27 rekomendasi yang ditujukan kepada penanggung jawab program (Eselon I). Sampai dengan periode 31 Desember 2017 dari rekomendasi kepada penangung jawab program (Eselon I), sebanyak 21 rekomendasi atau 77,78% telah ditindaklanjuti oleh penanggung jawab program sebagaimana dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015 s.d. 2017

IK-4	Rekomendasi hasil evaluasi saki yang dimanfaatkan oleh Penanggungjawab Program (Eselon I)				
Tahun	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)
2015	60	53	38	71,70	119,50
2016	65	21	13	61,90	95,24
2017	70	27	23	85,19	121,69
2018	75				
2019	80				

TPK : Target sesuai PK

R : Realisasi Rekomendasi

TL : Tindak Lanjut Rekomendasi

C : % Capaian Tindak Lanjut

K : % Kinerja Sesuai PK

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017, ditetapkan bahwa target capaian indikator kinerja rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab Program (Eselon I) sebesar 70%. Sampai dengan periode 31 Desember 2017 dari rekomendasi kepada penanggung jawab program (Eselon I), sebanyak 23 rekomendasi atau 85,19% sehingga capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator kinerja tersebut adalah 121,69%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016, terdapat peningkatan nilai tindak lanjut dan capaian kinerja dimana Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 juga telah melaksanakan kegiatan Evaluasi SAKIP yang menghasilkan jumlah rekomendasi sebanyak 21 rekomendasi ditujukan kepada penanggung jawab program (Eselon I) dan telah ditindaklanjuti sebanyak 13 rekomendasi atau 61,90% menjadi 85,19% pada tahun 2017 dengan nilai capaian sebesar 95,24% tahun 2016 menjadi 121,69% tahun 2017.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Dilihat dari capaian atas indikator kinerja 4 tahun 2015 s.d. 2017, terdapat fluktuasi capaian dengan rincian tahun 2015 sebesar 71,70% turun menjadi

61,90% tahun 2016 dan meningkat menjadi 85,19% pada tahun 2017. Peningkatan capaian tindak lanjut evaluasi saki pada tahun 2017 disebabkan setiap unit kerja yang dievaluasi telah menindaklanjuti rekomendasi berupa penyempurnaan dokumen-dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan sehingga sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator rekomendasi hasil evaluasi saki yang dimanfaatkan tahun 2015 s.d. 2017, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015 – 2019, diketahui bahwa tahun 2017 telah memenuhi dari target yang ditetapkan dalam renstra. Capaian tersebut dideskripsikan pada grafik sebagai berikut:



Grafik 4. Capaian Indikator 4 tahun 2015 s.d. 2017

Dilihat dari grafik diatas dapat diketahui terdapat tren flutuatif tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal terhadap seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Secara umum pencapaian target telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini didorong oleh faktor pemantauan atas rekomendasi SAKIP secara berkesinambunagn mengingat penilaian SAKIP Kementerian Pertanian sangat berkaitan erat dengan penilaian Reformasi Birokrasi dan Penilaian Maturitas SPIP sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan didorong untuk segera ditindaklanjuti. Faktor pendukung keberhasilan capaian tersebut adalah daya dukung struktur yang memadai sehingga memudahkan pola komunikasi dan informasi antar pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Tabel 12. Capaian Indikator 4 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target (%)	Realisasi(%)	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (3/80%)
2015	60,00	71,70	89,63
2016	65,00	61,90	77,38
2017	70,00	85,19	106,49
2018	75,00		
2019	80,00		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi SAKIP yang dimanfaatkan tahun 2017 untuk penanggung jawab program (Eselon I) telah mencapai 106,49% dari target yang ditetapkan sebesar 80% pada tahun 2019.

e. Rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program tingkat Eselon I dengan target 76% rekomendasi hasil reviu Laporan Keuangan dimanfaatkan oleh penanggungjawab program (Eselon I)

Inspektorat Jenderal tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 101 penugasan. Dari hasil Reviu Laporan Keuangan lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal, telah diterbitkan 101 laporan hasil reviu dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 56 rekomendasi ditujukan kepada penanggung jawab program (Eselon I). Sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dari 56 rekomendasi kepada penanggung jawab program (Eselon I), telah ditindaklanjuti sebanyak 53 rekomendasi atau 94,64%.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan Tahun 2015 s.d. 2017

IK-5	Rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan oleh Penanggungjawab Program (Eselon I)				
	Tahun	TPK (%)	R	TL	C (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)
2015	70	79	46	58,23	83,18
2016	72	45	32	71,11	98,77
2017	76	56	53	94,64	124,53
2018	78				
2019	82				

TPK : Target sesuai PK

C : % Capaian Tindak Lanjut

R : Realisasi Rekomendasi

K : % Kinerja Sesuai PK

TL : Tindak Lanjut Rekomendasi

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017, ditetapkan bahwa target capaian indikator kinerja rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab Program (Eselon I) sebesar 76% sedangkan capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator kinerja tersebut adalah 94,64 dengan capaian nilai kinerja sebesar 124,53% rekomendasi kepada penanggungjawab program (Eselon I).

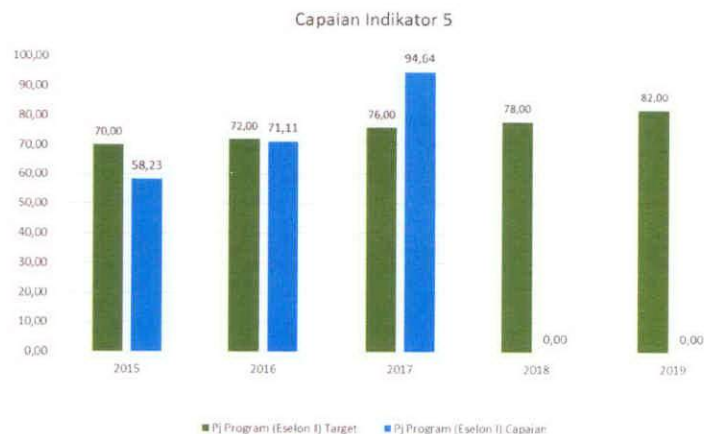
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016, terdapat peningkatan nilai tindak lanjut dan capaian kinerja dimana Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 juga telah melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan yang menghasilkan jumlah rekomendasi sebanyak 32 rekomendasi ditujukan kepada penanggung jawab program (Eselon I) dan telah ditindaklanjuti sebanyak 45 rekomendasi atau 71,11% dengan nilai kinerja 98,77 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 94,64% pada tahun 2017 dengan nilai capaian sebesar 124,53%.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Dilihat dari capaian atas indikator kinerja 5 tahun 2015 s.d. 2017, terdapat peningkatan atas capaian tindak lanjut rekomendasi hasil Reviu Laporan

Keuangan dengan rincian tahun 2015 sebesar 58,23% naik menjadi 71,11% tahun 2016 dan meningkat menjadi 94,64% pada tahun 2017.



Grafik 5. Capaian Indikator 5 tahun 2015 s.d. 2017

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan tahun 2015 s.d. 2017, apabila dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015 – 2019, diketahui bahwa pencapaiannya telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam renstra.

Tabel 14. Capaian Indikator 5 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (3/2)
2015	70,00	58,23	71,01
2016	72,00	71,11	86,72
2017	76,00	94,64	115,42
2018	78,00		
2019	82,00		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan tahun 2017 untuk penanggung jawab program (Eselon I) telah mencapai 115,42% dari target yang ditetapkan sebesar 82% pada tahun 2019.

2. Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian

a. Unit kerja level performing dengan target 55% unit kerja/UPT Kementan termasuk dalam kategori unit kerja level performing.

Inspektorat Investigasi telah melakukan penilaian Maturitas SPIP dengan menggunakan format sesuai Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPI tingkat Eselon I tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 15. Penilaian Maturitas SPI Unit Eselon I Kementerian Pertanian

NO	UNIT KERJA	NILAI	KATEGORI
1.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	4,50	Optimum
2.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,79	Terdefinisi
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	3,75	Terdefinisi
4.	Direktorat Jenderal Hortikultura	3,50	Terdefinisi
5.	Inspektorat Jenderal	3,46	Terdefinisi
6.	Sekretariat Jenderal	3,34	Terdefinisi
7.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	3,32	Terdefinisi
8.	Direktorat Jenderal Perkebunan	3,18	Terdefinisi
9.	Badan Ketahanan Pangan	3,07	Terdefinisi
10.	Badan Litbang Pertanian	2,91	Berkembang
11.	Badan Karantina Pertanian	2,87	Berkembang

Sumber data : Inspektorat Investigasi

Data capaian Penilaian Maturitas SPI Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 16. Interpretasi Penilaian SPI Kementan Sesuai Perka BPKP
No.4 Tahun 2016**

Level Maturitas SPI		Eselon I	UPT	Jumlah	%
Level V	Optimum	1	0	1	1,47
Level IV	Terkelola dan Terstruktur	0	1	1	1,47
Level III	Terdefinisi	8	28	36	52,94
Level II	Berkembang	2	23	25	36,76
Level I	Rintisan	0	5	5	7,35
Jumlah		11	57	68	100,00

Sumber data : Inspektorat Investigasi

Sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperinci karakteristik level tingkat maturitas SPIP sebagaimana dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 17. Karakteristik Level Maturitas SPIP Menurut Perka BPKP
No. 4 Tahun 2016**

Level	Keterangan
Belum Ada	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern
Rintisan	Praktik pengendalian intern bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan
Berkembang	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya
Terdefinisi	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai
Terkelola dan Terukur	Pengendalian intern diterapkan secara efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi
Optimum	Pengendalian Intern diterapkan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung dengan pemantauan otomatis

Sumber data : BPKP, 2017

Dalam Renstra Itjen Tahun 2015 – 2019, fase-fase penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian, terdiri dari:

- 1) *Knowing*, aktivitas yang dilakukan unit kerja berupa penelitian, kajian, benchmarking, sosialisasi, dan diklat dengan produk berupa laporan pelaksanaan
- 2) *Mapping*, aktivitas yang dilakukan berupa *diagnostic assessment* dengan produk berupa peta penerapan SPIP
- 3) *Norming*, membangun fondasi infrastruktur SPIP dengan aktivitas penetapan kebijakan dan SOP dengan produk berupa pedoman umum, pedoman teknis, modul diklat, aturan-aturan intern, laporan pelaksanaan, serta satlak-satlak dan produknya
- 4) *Forming*, membangun unsur-unsur SPIP dengan aktivitas berupa implementasi dan internalisasi SPIP dengan produk berupa laporan tahapan pengembangan SPIP, dan
- 5) *Performing*, pemanfaatan SPIP, aktifitas berupa monitoring dan evaluasi dengan produk berupa laporan hasil evaluasi SPIP.

Tabel 18. Capaian Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2017

Level Maturitas SPI	Jumlah	%	Level Menurut Fase SPIP (Renstra Itjen 2015-2019)	Jumlah	%
Level V Optimum	1	1,47	<i>Performing</i>	38	55,88
Level IV Terkelola dan Terstruktur	1	1,47			
Level III Terdefinisi	36	52,94	<i>Forming</i>	25	36,76
Level II Berkembang	25	36,76			
Level I Rintisan	5	7,35	<i>Mapping / Knowing</i>	5	7,35
Jumlah	68	100,00		68	100,00

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Sesuai data pada tabel 9 diketahui bawah hasil penilaian terhadap 68 unit kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- a. Unit kerja dengan maturitas Level V (Optimum) sebanyak 1 unit kerja (1,47%)
- b. Unit kerja dengan maturitas Level IV (Terkelola dan Terstruktur) sebanyak 1 unit kerja (1,47%)
- c. Unit kerja dengan maturitas Level III (Terdefinisi) sebanyak 36 unit kerja (52,94%)

- d. Unit kerja dengan maturitas Level II (Berkembang) sebanyak 25 unit kerja (36,76%)
- e. Unit kerja dengan maturitas Level I (Rintisan) sebanyak 5 unit kerja (7,35%)

Inspektorat Jenderal menghitung capaian tahun 2017 terdapat 38 unit kerja atau 55,88% unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dinilai pada level *performing*. Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017, ditetapkan bahwa target Unit Kerja level *performing* sebesar 60% unit kerja/UPT Kementan. Berdasarkan hasil penilaian di atas dapat disimpulkan capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator Unit Kerja level *performing* dengan target 55,58% adalah 93,13% telah dinilai maturitas penyelenggaraan SPIP unit kerja level *performing*.

Inspektorat Jenderal dalam mengukur capaian maturitas SPIP menggunakan pendekatan kriteria dan karakteristik antara Level Maturitas menurut Perka BPKP No 4 Tahun 2016 dengan Kriteria dan karakteristik maturitas SPIP sesuai dokumen Renstra Itjen 2015 – 2019, dimana karakteristik Level Optimum, Terkelola & Terukur, dan Terdefinisi dapat disejajarkan dengan karakteristik yang ada pada fase *performing* dimana unit kerja telah memanfaatkan SPIP dalam aktivitas *monitoring* (pengendalian) secara efektif dan evaluasi yang didokumentasikan dalam laporan rutin pengendalian intern kegiatan.

Tabel 19. Perbandingan Capaian Unit Kerja Performing Tahun 2015 s.d. 2017

IK-6	Unit Kerja Level Performing				
Tahun	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)
2015	50	178	67	37,64	75,28
2016	55	42	25	59,52	108,23
2017	85	68	38	55,88	65,74
2018	100				
2019	100				

TPK : Target sesuai PK

N : Jumlah Unit Dinilai

P : Jumlah Unit Performing

C : % Capaian Jumlah Unit Performing

K : % Kinerja Sesuai PK

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Apabila dibandingkan dengan capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator Unit Kerja level performing tahun 2016 sebesar 59,52% terdapat penurunan nilai capaian menjadi 55,88% pada tahun 2017 disebabkan pada penilaian maturitas SPIP tahun 2017 masih terdapat unit kerja yang penerapannya masuk dalam kategori rintisan dan berkembang. Inspektorat Jenderal akan berupaya untuk melakukan pembinaan secara intensif untuk mendorong unit kerja yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan fase *performing* untuk dapat meningkatkan maturitas SPIP menuju fase performing.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Dilihat dari capaian atas indikator unit kerja performing tahun 2015 s.d. 2017, terdapat terdapat penurunan nilai capaian unit kerja level *performing* dari 37,64% tahun 2015 meningkat menjadi 59,52% pada tahun 2016 dan mengalami penurunan menjadi 55,88% pada tahun 2017.

Hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan standar penilaian yang semula menggunakan standar penilaian sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019 sebelum revisi, selanjutnya menggunakan standar penilaian sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adanya beberapa kriteria yang belum sepenuhnya terpenuhi sehingga unit pelaksana teknis juga melakukan penyesuaian untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan. Inspektorat Jenderal senantiasa berupaya melalui pembinaan SPIP dan Forum Nasional SPIP menginisiasi untuk mengawal kesiapan unit pelaksana teknis dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Perka BPKP No 4 Tahun 2016.



Grafik 6. Capaian Indikator Unit Kerja Performing 2015 s.d. 2017

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator unit kerja *performing* tahun 2015 s.d. 2017, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015 – 2019, diketahui bahwa nilai capaian menunjukkan tren fluktuatif.

**Tabel 20. Capaian Indikator Unit Kerja Level Performing
Dibandingkan Target Jangka Menengah**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (3/2)
2015	50,00	37,64	37,64
2016	55,00	59,52	59,52
2017	85,00	55,88	55,88
2018	100,00		
2019	100,00		

Sumber data : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian unit kerja level performing tahun 2017 baru mencapai 55,88% dari target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2019. Inspektorat Jenderal perlu melakukan upaya pendampingan untuk mengawal pencapaian nilai maturitas sesuai target yang ditetapkan.

b. Unit kerja Zona Integritas WBK/WBBM dengan target 87%

Inspektorat Jenderal telah menginisiasi gerakan Pemasyarakatan Anti Korupsi dalam bentuk Pembinaan Anti Korupsi dan penilaian unit kerja untuk memperoleh predikat Unit Kerja WBK.

Penilaian ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menilai unit kerja melalui kriteria yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Penilaian WBK-WBBM tahun 2017 dilaksanakan pada 64 unit kerja pusat dan daerah. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada 11 unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, seluruhnya atau 100% dinyatakan dengan predikat WBK dengan nilai rata-rata 77,45 sedangkan dari 53 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian yang dinilai, sebanyak 47 UPT atau 90,62% dinyatakan dengan predikat WBK.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017, ditetapkan bahwa target nilai unit kerja zona integritas WBK/WBBM sebesar 87% dan capaian Inspektorat Jenderal terhadap penetapan unit kerja WBK menuju WBBM adalah sebesar 104,16%.

Tabel 21. Perbandingan Capaian Unit Kerja WBK/WBBM Tahun 2015 s.d. 2017

IK-7	Unit Kerja WBK/WBBM				
Tahun	TPK (%)	N	P	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)
2015	82	77	56	72,73	88,69
2016	85	55	50	90,91	106,95
2017	87	53	47	88,68	101,93
2018	100				
2019	100				

TPK : Target sesuai PK

N : Jumlah Unit Dinilai

P : Jumlah Unit WBK/WBBM

C : % Capaian Jumlah Unit WBK/WBBM

K : % Kinerja Sesuai PK

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Apabila dibandingkan dengan capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator Unit Kerja WBK/WBBM tahun 2016 sebesar 90,91% terdapat penurunan nilai capaian menjadi 88,68% pada tahun 2017. Adanya penurunan ini disebabkan karena jumlah unit kerja yang dinilai berkurang dan terdapat unit kerja yang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penilaian sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2015 s.d. 2017, terlihat ada fluktuasi capaian dimana tahun 2015 telah ditetapkan unit kerja WBK Menuju WBBM sebanyak 56 unit kerja atau nilai capaian Inspektorat Jenderal terhadap penetapan unit kerja WBK menuju WBBM sebesar 72,73%. Pada tahun 2016 terdapat peningkatan capaian menjadi 90,91%. Sedangkan pada tahun 2017, terdapat penurunan nilai presentase unit kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja dengan predikat Zona Integritas WBK/WBBM menjadi 88,68%.

Fluktuasi ini terjadi sebagai dampak atas perubahan kriteria penetapan WBK yang semula menggunakan standar yang ditetapkan melalui Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga menjadi kriteria yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Perubahan ini belum sepenuhnya direspon secara proaktif oleh seluruh unit pelaksana teknis di lingkup Kementerian Pertanian sehingga terdapat beberapa unit kerja yang belum memenuhi kriteria tersebut.



**Grafik 7. Capaian Indikator Unit Kerja WBK/WBBM
Tahun 2015 s.d. 2017**

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator unit kerja WBK/WBBM tahun 2015 s.d. 2017, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015 – 2019, diketahui bahwa meskipun nilai capaian menunjukkan tren fluktuatif, akan tetapi pencapaiannya telah memenuhi target yang ditetapkan dalam renstra.

**Tabel 22. Capaian Indikator Unit Kerja Berpredikat WBK
Dibandingkan Target Jangka Menengah**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (3/2)
2015	82,00	72,73	72,73
2016	85,00	90,91	90,91
2017	87,00	88,68	88,68
2018	100,00		
2019	100,00		

Sumber data : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2017 memiliki tren meningkat dengan capaian 88,68% dari target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2019.

Informasi Pendukung Capaian

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, Inspektorat Jenderal telah mengusulkan 21 Unit Pelaksana Teknis untuk memperoleh predikat unit kerja WBK Nasional versi Kementerian PAN dan RB.

Sebagai hasil atas Pembinaan Integritas Program dan Layanan lingkup Kementerian Pertanian terhadap seluruh Satuan Kerja/UPT lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2017, Kementerian PAN dan RB menetapkan 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Nasional, yaitu: Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor.

3. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementan dengan indikator nilai *Internal Audit Capability Model/IACM* dengan target nilai IACM level 3

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 dengan pendekatan *Internal Audit Capability Model* (IACM) oleh BPKP dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 Nomor: SP-3/D1/02/2018 tanggal 15 Januari 2018, Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (*integrated*) dengan catatan. Catatan perbaikan yang harus dipenuhi antara lain: 1) mengembangkan dan menerapkan sistem informasi pengumpulan dan pengelolaan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern, 2) meningkatkan peran *advisory services*, baik berupa pemenuhan permintaan *stakeholders*, maupun peran aktif Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memberikan jaminan pencapaian tujuan organisasi, 3) meningkatkan inovasi bidang teknologi informasi sebagai pendukung implementasi *Continuous Auditing and Continuous Monitoring* (CACM), dan 4) menyelesaikan peraturan terkait tata kelola Inspektorat Jenderal.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017, ditetapkan bahwa target nilai nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM) level 3 dan capaian Inspektorat Jenderal adalah level 3 atau 100%.

Tabel 23. Perbandingan Capaian Nilai Level IACM Tahun 2015 s.d. 2017

IK-7	Unit Kerja Kapabilitas APIP (Nilai)			
	TPK (%)	R	C (%)	K (%)
	1	2	3	4 (3/2)
2015	2	2	100	100
2016	2	2	100	100
2017	3	3	100	100
2018	3			
2019	3			

TPK : Target sesuai PK

R : Realisasi Nilai Hasil Validasi BPKP

C : % Capaian Nilai

K : % Kinerja Sesuai PK

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 dan 2016, dimana pada tahun 2016 sesuai dengan hasil kegiatan Assesment Tata Kelola Inspektorat Jenderal oleh Tim Asesor BPKP diperoleh hasil kapabilitas APIP Itjen pada level 2. Pada akhir tahun 2016, terdapat peningkatan capaian dimana terhadap hasil penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016 sesuai Laporan Hasil Validasi Nomor: LHE-296/D10/2016 tanggal 28 Desember 2016, Inspektorat Jenderal berada pada level 2+ (*infrastructure*). Tahun 2017 nilai *Internal Audit Capability Model*(IACM) Inspektorat Jenderal berada pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015 – 2019.



Grafik 8. Capaian Indikator Kapabilitas APIP/IACM Tahun 2015 s.d. 2017

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dengan melihat capaian kapabilitas APIP Itjen pada tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015 – 2019, bahwa Inspektorat Jenderal telah mencapai nilai kapabilitas APIP/IACM level 3 pada tahun 2017 sehingga untuk tahun yang akan datang Inspektorat Jenderal harus mempertahankannya sampai dengan akhir tahun 2019.

Tabel 24. Capaian Indikator Nilai IACM Itjen Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
2015	2	2,00	2,00
2016	2	2,00	2,00
2017	3	3,00	3,00
2018	3		
2019	3		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian nilai kapabilitas APIP/IACM tahun 2017 telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan level 3 pada tahun 2019.

Telaah Sejawat

Dalam rangka memberikan keyakinan atas peningkatan kapabilitas APIP sebagaimana interpretasi dari nilai IACM yang telah mencapai level 3 pada tahun 2017, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Telaah Sejawat. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas APIP, memberi pendapat tentang kesesuaian kegiatan APIP dengan Standar Audit, dan memberi saran agar APIP dapat memberi nilai tambah bagi organisasi.

Sesuai Surat Tugas Ketua Komite Telaah Sejawat Nomor 10/AAIPI//TS/2017 telah dilaksanakan kegiatan Telaah Sejawat pada tanggal 14 – 28 Agustus 2017 dengan penelaah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan hasil nilai sebesar 85,72 dengan predikat Baik.

B. AKUNTABILITAS DANA

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENGAWASAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2017 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp92.439.375.000 yang direalisasikan dengan baik melalui penerapan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp85.722.719.223 atau 92,73% dari pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp92.439.375.000 dengan realisasi fisik sebesar 115,45%.

Sesuai dengan target pencapaian misi Inspektorat Jenderal Tahun 2017, anggaran Inspektorat Jenderal dikategorikan berdasarkan target pencapaian misi. Alokasi anggaran dan realisasi berdasarkan misi tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 25. Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2017 berdasarkan Misi

No	Misi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengawasan Akuntabilitas Program	40.438.800.000	38.129.928.208	94,29
2	Peningkatan Maturitas SPIP	10.584.800.000	9.704.018.055	91,68
3	Peningkatan Kapasitas APIP	41.415.775.000	37.888.772.960	91,48

Sumber data : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Dari alokasi anggaran sesuai dengan misi, dialokasikan juga sesuai dengan jenis kegiatan pengawasan mendukung misi Inspektorat Jenderal.

Alokasi anggaran per jenis kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal dijabarkan dalam tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 26. Capaian Kinerja Mendukung Misi

	Urutan	Target	Satuan	Realisasi	Jml Lap	Anggaran	Realisasi	%	Biaya/Unit
Mendukung Misi 1									
1	Audit Kinerja	624	Rekomendasi	716	602	22.377.150.000	22.804.540.032	101,91	37.861.298
2	Audit Investigasi	16	Rekomendasi	5	2	115.828.000	57.745.284	58,49	33.872.642
3	Audit Tujuan Tertentu	20	Rekomendasi	37	41	4.859.846.000	4.723.488.816	97,19	115.206.996
3	Pendampingan	181	Rekomendasi	213	154	9.050.088.000	8.126.841.611	89,82	52.785.335
4	Evaluasi SAKIP	24	Rekomendasi	27	27	1.797.728.000	1.687.097.300	92,73	61.744.344
5	Reviu Laporan Keuangan	45	Rekomendasi	56	101	3.458.676.000	3.272.088.938	94,61	32.396.920
	Jumlah	910		1054	927	41.558.318.000	40.663.899.981	97,61	43.866.127
Mendukung Misi 2									
6	Maturitas SPIP Lingkup Kementerian Pertanian (Unit Kerja Level Performing)	60	% Unit Kerja Level Performing	55,88	70	1.635.474.000	1.531.958.898	93,67	21.885.127
7	Nilai Unit Kerja WSKWBSM	87	% Unit Kerja WBK	90,82					
	Jumlah	1102		146,5	70	1.635.474.000	1.531.958.898	93,67	21.885.127
Mendukung Misi 3									
8	Nilai IACM	3	Nilai	3	1	90.800.000	32.250.000	35,52	32.250.000
	Jumlah	3		3	1	90.800.000	32.250.000	35,52	32.250.000

Biaya yang dikeluarkan dalam setiap pelaksanaan pengawasan dihitung per laporan kegiatan yang diterbitkan berdasarkan biaya realisasi dengan jumlah output dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah total LHP yang diterbitkan pada kegiatan mendukung misi 1 (rekomendasi) sebanyak 927 laporan dengan total biaya Rp40.663.899.981,00. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu LHP adalah Rp43.866.127,00. Rata-rata biaya tertinggi pada kegiatan mendukung misi 1 (rekomendasi) adalah kegiatan Audit Tujuan Tertentu dengan jumlah biaya per laporan sebesar Rp115.206.996,00 dan terendah adalah kegiatan Reviu Laporan Keuangan sebesar Rp32.396.127,00.
- Rendahnya realisasi kegiatan Audit Investigasi disebabkan karena sampai dengan akhir Desember 2017 hanya ada 2 pengaduan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Audit Investigasi.
- Untuk rata-rata biaya kegiatan yang mendukung misi 2 sebanyak 2 kegiatan dalam rangka penilaian maturitas SPI dan unit kerja WBK dengan yang menghasilkan 27 laporan hasil penilaian dengan total biaya sebesar Rp1.531.958.898,00 dengan biaya rata-rata per laporan sebesar Rp21.885.127,00.

- Kegiatan yang mendukung misi 3 adalah validasi Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP dengan jumlah biaya yang digunakan sebesar Rp32.250.000,00

2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Efisiensi Dana dan Hari Pengawasan (HP) Menurut Realisasi dan Perencanaan

Realisasi pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal yang disajikan dalam laporan ini meliputi realisasi pada kegiatan utama yaitu Audit Kinerja, Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu, Pengawasan, Evaluasi SAKIP, Reviu LK, Reviu RKAKL, dan Dukungan Manajemen lainnya. Secara rinci realisasi kegiatan terinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Realisasi Penggunaan Anggaran Menurut Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2017.

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Target		Realisasi		Kinerja	
			Lap.	Lap.	Total Biaya	Biaya/Lap	Total Biaya	Biaya/Lap	Biaya total	Biaya/Lap
A. Inspektorat I,II,III,IV										
1	Assesment Penyelenggaraan SPIP	Laporan								
2	Audit BMN	Laporan	77	77	2.827.558.000	36.721.532	2.788.391.588	36.212.878	98,61	1,39
3	Audit Kinerja/Operasional	Laporan	199	199	7.685.352.083	38.619.860	8.394.245.243	42.182.137	109,22	9,22
4	Audit Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	288	288	10.796.487.917	37.487.805	9.888.472.401	34.334.974	91,59	8,41
5	Evaluasi Program	Laporan	38	38	1.067.752.000		1.733.430.800			
6	Evaluasi SAKIP	Laporan	27	27	1.797.728.000	66.582.519	1.667.097.300	61.744.344	92,73	7,27
7	Kegiatan Dukungan Manajemen Lainnya	Laporan								
8	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Laporan	406	406	1.692.094.000	4.167.719	1.442.298.112	3.552.458	85,24	14,76
9	Pengawasan/Penyelenggaraan SPI Kegiatan	Laporan	154	154	9.050.088.000	58.766.805	8.128.941.611	52.785.335	89,82	10,18
10	Penyelenggaraan SPI Itjen	Laporan	69	69	245.370.000	3.556.087	109.185.000	1.582.391	44,50	55,50
11	Penyusunan laporan bulanan/ Triwulan/ Tahunan Pelaksanaan Anggaran	Laporan	72	72	876.542.000	12.174.194	581.977.000	8.083.014	66,39	33,61
12	Reviu Laporan Keuangan	Laporan	101	101	3.458.676.000	34.244.317	3.272.088.938	32.396.920	94,61	5,39
13	Reviu Peraturan (Termasuk Pedoman)	Laporan	2	2	129.720.000		24.200.000			100,00
14	Reviu RKA-KL	Laporan	48	48	509.149.000	10.607.271	385.342.120	8.027.961	75,68	24,32
15	Workshop/Seminar/ Forum Penyelenggaraan SPIP	Laporan	21	21	512.453.000	24.402.524	427.581.409	20.361.019	83,44	16,56
B. Inspektorat Investigasi										
1	Assesment Penyelenggaraan SPIP	Laporan	70	70	1.635.474.000	23.363.914	1.531.958.898	21.885.127	93,67	6,33
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	196	196	4.859.846.000	24.795.133	4.723.486.816	24.099.423	97,19	2,81
3	Audit Investigasi	Laporan	4	4	115.828.000	28.957.000	67.745.284	16.936.321	58,49	41,51
4	Pengawasan/Penyelenggaraan SPI Kegiatan	Laporan	8	8	151.502.000	18.937.750	23.070.000	2.883.750	15,23	84,77
5	Workshop/Seminar/ Forum Penyelenggaraan SPIP	Laporan	1	1	3.572.129.000	3.572.129.000	3.422.383.400	3.422.383.400	95,81	4,19
Sekretariat										
	Dukungan Manajemen		1.052	1.052	41.415.775.000	39.368.607	38.122.118.456	36.237.755	92,05	7,95
			2.912	2.912	92.448.375.000	31.747.382	86.876.546.076	29.833.979	93,97	6,03

Jumlah total laporan yang diterbitkan tahun 2017 sebanyak 2.912 laporan dengan total biaya sebesar Rp86.876.546.076,00. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu laporan adalah Rp29.833.979,00. Nilai kinerja atas penggunaan anggaran terhadap laporan yang terbit sebesar 93,97% dengan efisiensi kegiatan sebesar 6,03%, artinya dari target anggaran yang digunakan untuk menghasilkan 2.912 laporan adalah sebesar

Rp92.448.375.000 dapat terealisasi dengan menggunakan anggaran sebesar Rp86.876.546.076,00.

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran tahun berjalan dan output yang dihasilkan menggunakan metode perhitungan efisiensi sesuai PMK No. 249 Tahun 2011 (Lampiran A.1.d).

Data realisasi kegiatan sesuai indikator penetapan kinerja sebagai berikut:

Tabel 28. Realisasi Anggaran dan Output Per Indikator

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	Audit Kinerja	Rekom	716	651	22.377.150.000	22.804.540.032
2	Audit Investigasi	Rekom	5	4	115.828.000	67.745.284
3	Pengawasan	Rekom	213	201	9.050.088.000	8.128.941.611
4	Evaluasi SAKIP	Rekom	27	21	9.050.088.000	8.128.941.611
5	Reviu LK	Rekom	56	53	1.797.728.000	1.667.097.300
6	Unit Kerja Level Performing	%	85	55,88	3.458.676.000	3.272.088.938
7	Nilai Unit Kerja Zona Integritas WBK/WBBM	%	85	90,62	713.735.000	713.634.917
8	Nilai Internal Audit Capability Model / IACM	Level	3	3,00	90.800.000	32.250.000
					46.654.093.000	44.815.239.693

Untuk keperluan perhitungan efisiensi dilakukan penyesuaian satuan output kegiatan dengan metode menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja yang dijadikan dasar dalam menghitung efisiensi tersebut.

Perhitungan efisiensi dengan metode perhitungan efisiensi dalam PMK No. 249 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja pada Lampiran A.1.d dengan rumus sebagai berikut:

Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke i} / RVK_{ke i}}{PAK_{ke i} / TVK_{ke i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

E : Efisiensi
 RAK : Realisasi anggaran per Keluaran
 PAK : Pagu anggaran per Keluaran
 RVK : Realisasi volume Keluaran
 TVK : Target volume Keluaran
 n : Jumlah jenis Keluaran

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 29. Perhitungan Efisiensi

No.	Kegiatan/Output	Target		Realisasi				Unit cost		Efisiensi
		Kinerja	Anggaran	Kinerja		Anggaran		Target	Realisasi	
				Jml.	%	Jml.	%			
	Prog. Was. & peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementan		92.439.375.000			76.373.105.063	82,62			
A.	Peningkatan Was. & peningkatan akunt. pada Satker									
I.	Setjen, Ditjen Horti, & BPPSDMP		10.515.100.000			9.852.871.687	93,70			
1	Audit kinerja	170	4.611.036.000	207	121,76	4.521.938.497	98,07	26.599.638	21.845.114	17,87
2	Pengawasan	7	1.438.572.000	9	128,57	1.362.664.884	94,72	205.510.286	151.407.209	26,33
3	Evaluasi SAKIP	14	541.952.000	16	114,29	527.924.400	97,41	38.710.857	32.995.275	14,76
4	Reviu LK	5	742.114.000	6	120,00	732.613.300	98,72	148.422.800	122.102.217	17,73
5	Layanan audit	1	3.181.426.000	1	100,00	2.707.730.606	85,11	3.181.426.000	2.707.730.606	14,89
II.	Ditjen TP, PSP	229	10.512.300.000	267	116,59	10.345.702.385	98,42	45.905.240	38.747.949	15,59
1	Audit kinerja	126	4.623.652.000	151	119,84	4.574.716.377	98,94	36.695.651	30.296.135	17,44
2	Pengawasan	88	1.438.572.000	99	112,50	1.430.236.418	99,42	16.347.409	14.446.833	11,63
3	Evaluasi SAKIP	2	415.832.000	2	100,00	359.730.000	86,51	207.916.000	179.865.000	13,49
4	Reviu LK	12	457.752.000	14	116,67	446.532.700	97,55	38.146.000	31.895.193	16,39
5	Layanan audit	1	3.576.492.000	1	100,00	3.534.486.890	98,83	3.576.492.000	3.534.486.890	1,17
III.	Bun, Utbang, BKP	250	9.735.600.000	285	114,00	8.274.946.293	85,00	38.942.400	29.034.899	25,44
1	Audit kinerja	178	4.631.076.000	199	111,80	4.597.735.702	99,28	26.017.281	23.104.200	11,20
2	Pengawasan	50	1.438.572.000	60	120,00	1.372.129.600	95,38	28.771.440	22.868.827	20,52
3	Evaluasi SAKIP	3	427.472.000	3	100,00	255.944.800	59,87	142.490.667	85.314.933	40,13
4	Reviu LK	18	447.094.000	22	122,22	182.182.138	40,75	24.838.556	8.281.006	66,66
5	Layanan audit	1	2.791.386.000	1	100,00	1.866.954.053	66,88	2.791.386.000	1.866.954.053	33,12
IV.	Itjen, Barantan, PKH	202	9.675.800.000	225	111,39	7.929.855.757	81,96	47.900.000	35.243.803	26,42
1	Audit kinerja	150	4.616.076.000	159	106,00	4.366.878.768	94,60	30.773.840	27.464.646	10,75
2	Pengawasan	36	1.438.572.000	45	125,00	1.003.160.100	69,73	39.960.333	22.292.447	44,21
3	Evaluasi SAKIP	5	412.472.000	6	120,00	399.134.000	96,77	82.494.400	66.522.333	19,36
4	Reviu LK	10	432.094.000	14	140,00	383.288.000	88,70	43.209.400	27.377.714	36,64
5	Layanan audit	1	2.776.586.000	1	100,00	1.777.394.889	64,01	2.776.586.000	1.777.394.889	35,99
B.	Pengawasan Tujuan Tertentu	1	10.584.800.000	1	100,00	6.451.001.199	60,95	10.584.800.000	6.451.001.199	39,05
C.	Dukungan manajemen & Teknis	3	41.415.775.000	3	100,00	33.518.727.742	80,93	13.805.258.333	11.172.909.247	19,07
1	Layanan dukungan manaj.	1	13.402.411.000	1	100,00	9.709.787.484	72,45	13.402.411.000	9.709.787.484	27,55
2	Layanan Internal	1	2.010.364.000	1	100,00	1.499.829.927	74,60	2.010.364.000	1.499.829.927	25,40
3	Layanan perkantoran	1	26.003.000.000	1	100,00	22.309.110.331	85,79	26.003.000.000	22.309.110.331	14,21

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai efisiensi terhadap seluruh indikator sebesar 23,50%.

Nilai ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran strategi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017, Inspektorat Jenderal telah menggunakan sumber daya secara efisien sebesar 23,50%.

Tabel 30. Realisasi Penggunaan Hari Penugasan (HP) Menurut Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2017.

No.	Kegiatan	Satuan	Target			Realisasi			Kinerja	
			HP	Lap.	Rasio	HP	Lap.	Rasio	HP	Lap.
A. Inspektorat I,II,III,IV										
1	Assesment Penyelenggaraan	Laporan								
2	Audit BMN	Laporan	1.586	77	20,60	1.836	77	23,84	115,76	100,00
3	Audit Kinerja/Operasional	Laporan	5.804	199	29,17	6.663	199	33,48	114,80	100,00
4	Audit Pengadaan	Laporan	8.814	288	30,60	8.656	288	30,06	98,21	100,00
5	Evaluasi Program	Laporan	1.446	38		944	38			
6	Evaluasi SAKIP	Laporan	733	27	27,15	2.135	27	79,07	291,27	100,00
7	Kegiatan Dukungan Manajemen Lainnya	Laporan								
8	Kegiatan Pengawasan	Laporan	4.598	406	11,33	3.960	406	9,75	86,12	100,00
9	Pengawasan/Penyelenggaraan SPI Kegiatan	Laporan	4.418	154	28,69	3.932	154	25,53	89,00	100,00
10	Penyelenggaraan SPI Itjen	Laporan	332	69	4,81	332	69	4,81	100,00	100,00
11	Penyusunan laporan bulanan/ Triwulan/ Tahunan Pelaksanaan Anggaran	Laporan	2.559	72	35,54	2.199	72	30,54	85,93	100,00
12	Reviu Laporan Keuangan	Laporan	2.651	101	26,25	2.651	101	26,25	100,00	100,00
13	Reviu Peraturan (Termasuk Pedoman)	Laporan	30	2		30	2			
14	Reviu RKA-KL	Laporan	491	48	10,23	504	48	10,50	102,65	100,00
15	Workshop/Seminar/ Forum Penyelenggaraan SPIP	Laporan	406	21	19,33	406	21	19,33	100,00	100,00
B. Inspektorat Investigasi										
1	Assesment Penyelenggaraan	Laporan	1.387	70	19,81	1.694	70	24,20	122,13	100,00
2	Audit Dengan Tujuan	Laporan	3.843	196	19,61	2.942	196	15,01	76,55	100,00
3	Audit Investigasi	Laporan	78	4	19,50	18	4	4,50	23,08	100,00
4	Pengawasan/Penyelenggaraan SPI Kegiatan	Laporan	21	8	2,63	8	8	1,00	38,10	100,00
5	Workshop/Seminar/ Forum Penyelenggaraan SPIP	Laporan	127	1	127,00	124	1	124,00	97,64	100,00
C. Sekretariat										
	Dukungan Manajemen		14.687	1.052	13,96	12.310	1.052	11,70	16	100
			54.333	2.912	18,66	51.644	2.912	17,73	95,05	100,00

Dilihat dari aspek penggunaan jumlah Hari Pengawasan (HP) selama tahun 2017 sebanyak 51.644 HP. Dibandingkan dengan jumlah total laporan yang diterbitkan sebanyak 2.912 maka diperoleh rasio penggunaan HP sebesar 17,73% hari per laporan yang terbit.

Efisiensi penggunaan HP sebesar 4,95% dimana target penggunaan HP sebanyak 54.333 HP dengan realisasi sebanyak 51.644 HP.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu kepada uraian akuntabilitas di bab-bab sebelumnya, Inspektorat Jenderal dapat memenuhi sebagian besar target Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Namun karena berbagai keterbatasan, Inspektorat Jenderal juga mengidentifikasi area yang masih memerlukan penyempurnaan.

Secara Ringkas pencapaian terhadap Visi dan Misi Inspektorat Jenderal direpresentasikan oleh capaian hasil program (*outcome*) dan capaian hasil kegiatan (*output*) dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan nilai rata-rata capaian sebesar 108,83% dengan kategori capaian sebagai berikut:

1. Sejumlah 7 indikator dari 10 indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil
2. Terdapat 3 indikator dari 10 indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori berhasil.

Efisiensi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran strategi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017, Inspektorat Jenderal telah menggunakan sumber daya secara efisien sebesar 23,50%.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu kepada uraian akuntabilitas di bab-bab sebelumnya, Inspektorat Jenderal dapat memenuhi sebagian besar target Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Namun karena berbagai keterbatasan, Inspektorat Jenderal juga mengidentifikasi area yang masih memerlukan penyempurnaan.

Secara Ringkas pencapaian terhadap Visi dan Misi Inspektorat Jenderal direpresentasikan oleh capaian hasil program (*outcome*) dan capaian hasil kegiatan (*output*) dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan nilai rata-rata capaian sebesar 108,83% dengan kategori capaian sebagai berikut:

1. Sejumlah 7 indikator dari 10 indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil
2. Terdapat 3 indikator dari 10 indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori berhasil.

Efisiensi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran strategi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017, Inspektorat Jenderal telah menggunakan sumber daya secara efisien sebesar 23,50%.

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS

Bertolak pada berbagai permasalahan yang dihadapi, rencana tindak strategis diarahkan pada peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh seluruh unsur di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sebagai upaya menyatukan dan mengarahkan berbagai kepentingan untuk mewujudkan tujuan/sasaran strategis pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi sebagai *tools* pengendalian menjadi sangat strategis.

Upaya mewujudkan gagasan tersebut, dikembangkan Sistem Informasi yang mendukung kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018. Disamping pengadaan *hardware*/perangkat keras, dan *software*/perangkat lunak, pengembangan kemampuan SDM/*brainware* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Peningkatan kemampuan SDM/*brainware* dilakukan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, baik yang dilakukan dalam bentuk *workshop/Focus Group Discussion (FGD)*, atau melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan lainnya.

Upaya lain dalam meningkatkan kualitas pengawasan, Inspektorat Jenderal melakukan percepatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan khususnya terhadap kegiatan Audit Investigasi.

Sedangkan peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan dilakukan langkah-langkah pengembangan dan penerapan sistem informasi pengumpulan dan pengelolaan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern, peningkatan peran *advisory services*, baik berupa pemenuhan permintaan *stakeholders*, maupun peran aktif Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memberikan jaminan pencapaian tujuan organisasi, peningkatan inovasi bidang teknologi informasi sebagai pendukung implementasi *Continous Auditing and Continous Monitoring (CACM)* dan menyelesaikan peraturan terkait tata kelola Inspektorat Jenderal

Inspektur Jenderal



Justan Riduan Siahaan, Ak., M.Acc., CA, QIA
NIP. 196002201982031001

LAMPIRAN

IK-1	Rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan									
	Penanggungjawab Program (Es 1)					Penanggung jawab Kegiatan (Es II/Satker)				
Tahun	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)	7	8	9	10 (9/8)	11 (10/7)
2015	70	140	80	57,14	81,63	75	1231	750	60,93	81,23
2016	72	77	55	71,43	99,21	77	600	459	76,50	99,35
2017	75	114	100	87,72	116,96	80	602	527	87,54	109,43
2018	81					81				
2019	85					85				

TPK : Target sesuai PK

C : % Capaian Tindak Lanjut

R : Realisasi Rekomendasi

K : % Kinerja Sesuai PK

TL : Tindak Lanjut Rekomendasi

IK-2	Rekomendasi hasil audit investigasi yang dimanfaatkan									
	Penanggungjawab Program (Es 1)					Penanggungjawab Kegiatan (Es II/Satker)				
Tahun	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)	7	8	9	10 (9/8)	11 (10/7)
2015	75	32	20	62,50	83,33	75	359	221	61,56	82,08
2016	76	53	33	62,26	81,93	76	131	83	63,36	83,37
2017	80	3	2	66,67	83,33	80	2	2	100,00	125,00
2018	85					85				
2019	90					90				

TPK : Target sesuai PK

C : % Capaian Tindak Lanjut

R : Realisasi Rekomendasi

K : % Kinerja Sesuai PK

TL : Tindak Lanjut Rekomendasi

IK-3	Rekomendasi hasil pengawalan yang dimanfaatkan oleh Penanggungjawab Program (Eselon I)				
	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)
2015	70	375	211	56,27	80,38
2016	75	186	130	69,89	93,19
2017	80	213	187	87,79	109,74
2018	85				
2019	95				

TPK : Target sesuai PK

C : % Capaian Tindak Lanjut

R : Realisasi Rekomendasi

K : % Kinerja Sesuai PK

TL : Tindak Lanjut Rekomendasi

IK-4 Rekomendasi hasil evaluasi sakip yang dimanfaatkan oleh Penanggungjawab Program (Eselon I)					
Tahun	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)
2015	60	53	38	71,70	119,50
2016	65	21	13	61,90	95,24
2017	70	27	23	85,19	121,69
2018	75				
2019	80				

TPK : Target sesuai PK

C : % Capaian Tindak Lanjut

R : Realisasi Rekomendasi

K : % Kinerja Sesuai PK

TL : Tindak Lanjut Rekomendasi

IK-5 Rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan oleh Penanggungjawab Program (Eselon I)					
Tahun	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)
2015	70	79	46	58,23	83,18
2016	72	45	32	71,11	98,77
2017	76	56	53	94,64	124,53
2018	78				
2019	82				

TPK : Target sesuai PK

C : % Capaian Tindak Lanjut

R : Realisasi Rekomendasi

K : % Kinerja Sesuai PK

TL : Tindak Lanjut Rekomendasi

IK-6 Unit Kerja Level Performing					
Tahun	TPK (%)	R	TL	C (%)	K (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (5/2)
2015	50	178	67	37,64	75,28
2016	55	42	25	59,52	108,23
2017	60	68	38	55,88	93,14
2018	100				
2019	100				

TPK : Target sesuai PK

C : % Capaian Tindak Lanjut

R : Realisasi Rekomendasi

K : % Kinerja Sesuai PK

TL : Tindak Lanjut Rekomendasi

IK-7	Unit Kerja WBK/WBBM				
Tahun	TPK (%)	N	P	C (%)	K (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (4/3)</i>	<i>6 (5/2)</i>
2015	82	77	56	72,73	88,69
2016	85	55	50	90,91	106,95
2017	87	53	47	88,68	101,93
2018	100				
2019	100				

TPK : Target sesuai PK

C : % Capaian Jumlah Unit WBK/WBBM

N : Jumlah Unit Dinilai

K : % Kinerja Sesuai PK

P : Jumlah Unit Performing

IK-7	Unit Kerja Kapabilitas APIP (Nilai)			
Tahun	TPK (%)	R	C (%)	K (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (4/3)</i>
2015	2	2	100	100
2016	2	2	100	100
2017	3	3	100	100
2018	3			
2019	3			

TPK : Target sesuai PK

C : % Capaian Nilai

R : Realisasi Nilai Hasil Validasi

K : % Kinerja Sesuai PK